

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan perbincangan saat ini dalam masyarakat salah satunya adalah pajak. Di samping karena menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara, pajak juga menjadi perbincangan karena adanya beberapa kasus besar yang di tangani oleh pemerintah berhubungan dengan pajak. Sebagaimana halnya perekonomian suatu rumah tangga, perekonomian suatu kegiatan usaha atau perusahaan, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran yang perlu dikelola pada suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Dalam perekonomian negara Indonesia setiap tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai kebijakan keuangan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintah.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari seharusnya. Selain itu banyak kejadian atau kasus penyimpangan dan penyelewengan karena tentang penerapan pajak yang masih kurang, beberapa hal tersebut menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak belum dapat mengoptimalkan pajak penghasilan final.

Dalam peraturan pemerintah tentang perpajakan menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai barang atau jasa bagi kepentingan bersama. Selain itu ada definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang disingkat (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, setelah definisi resmi yang dimuat dalam undang- undang perpajakan Nomor 28 tahun 2007 belum ada perubahan yang baru.

Secara umum, pengertian pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk membiayai pembelanjaan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Definisi penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang dari berasal Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Sistem pemungutan dan lembaga pemungut dari setiap pajak yang berbeda sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan dikelola

oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di setiap kota atau kabupaten untuk pajak penghasilan pribadi maupun badan.

Pajak secara umum pajak digolongkan menjadi beberapa macam, pertama pajak penghasilan yang merupakan pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang sudah terdaftar sebagai badan usaha kena pajak, kedua pajak pertambahan nilai yang merupakan pajak atas konsumsi barang dalam negeri, dan ketiga adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak penghasilan (PPh) akan selalu dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan usaha selaku wajib pajak memperoleh penghasilan. Pada hakekatnya perpajakan Indonesia ditetapkan berdasarkan undang – undang, hal ini merupakan pencerminan bagian tonggak demokrasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini merupakan suatu realita negara yang merdeka dan berdaulat. Sesuai perjalanan sejarah perpajakan nasional di Indonesia tak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan kerangka acuan perubahan undang - undang dan peraturan perpajakan sebagian besar bersumber dari sistem perpajakan colonial penjajah.

Sebagian besar penduduk Indonesia melakukan kegiatan usaha dengan berdagang. Pada Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan

lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan merupakan pekerjaan dengan karya atau kreatifitas yang tidak di butuhkan persyaratan tertentu dan cenderung sangat sederhana seperti tingkat pendidikan, keahlian dan penggunaan modal yang tidak terlalu banyak di keluarkan.

Salah satu sektor swasta yang dilirik oleh pemerintah adalah memiliki potensi besar dalam pemasukan pajaknya, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), omset dan labanya jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Namun banyak usaha UMKM yang kita jumpai di setiap jalan, tidak hanya dikota besar banyak juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pelosok nusantara seperti aceh hingga papua, nyatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memberikan pendapatan pada perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, walaupun dalam PP (46) tersebut secara tersurat tidak disebutkan kelompok atau pelaku usaha mana yang menjadi sasarannya.

Peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan final tersebut masih terus dilakukan pengkajian dan pembaruan. Hal ini ditandai dengan adanya peraturan baru tentang pajak penghasilan final yaitu Peraturan Pemerintah (PP) noor 46 tahun 2013 yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha. yang di terima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 milyar selama satu tahun fiskal.

Untuk Peraturan Pemerintah (PP)46 tahun sudah dimulai diberlakukan bulan juni 2013 lalu yang kemudian menjadi peraturan perhitungan baru dalam

menghitung pajak penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan wajib pajak. Dalam bagian pertimbangan, disebutkan bahwa PP (46) ini ditunjukan untuk memajaki subjek pajak dengan penghasilan tertentu, sedangkan pasal 4 ayat (2) huruf e undang-undang PPh merujuk kepada pemajakan terhadap objek tertentu.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 diberlakukan dengan adanya tujuan mempermudah tata cara perhitungan pajak baik oleh fiskus maupun wajib pajak karena perhitungannya hanya didasarkan perhitungan bruto saja, maka petugas pajak tidak memakan waktu lama dalam pengecekan laporan SPT wajib pajak. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 ini dapat mempermudah dan meminimalisir waktu dalam perhitungan pajak karena wajib sudah tidak perlulagi menyajikan laporan keuangan berupa laporan laba/rugi atau neraca karena dalam (PP) nomor 46 tahun perhitungannya hanya dengan menyajikan pencatatan peredaran bruto setiap bulannya dalam masa satu tahun fiskal.

1.2 Rumusan Masalah

Pada uraian latar belakang diatas, mengapa usahawan tersebut menyetorkan SPT tahunan jenis pajaknya (PP) nomor 46 tahun 2013 bersifat final? Kedua, masalah dalam penerapan pajak penghasilan final (PP) nomor 46 tahun 2013, bagaimana cara mengatasinya?

1.3 Tujuan Studi Lapang

Pada tujuan studi lapang tersebut agar mengetahui peredaran penghasilan bruto pada CV. Arfindo Global yang di atur pajaknya pada (PP) nomor 46 tahun 2013 yang bersifat final.

1.4 Manfaat Studi Lapang

Masyarakat di indonesiaakan mengerti pajak dan tata cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran yang sudah diatur sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku.

Praktiknya, jika dilakukan penelitian secara langsung kepada subjek pajak, bahwa dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan kondisi yang mudah dilaksanakan, sederhana apalagi dengan tarif yang rendah merupakan salah satu yang diinginkan oleh masyarakat. Kategori UMKM tersebut dapat dimaklumi, karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan berbagai keterbatasan yang ada dalam kegiatan yang dilakukan, umumnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah hanya focus dalam kegiatan usahanya. Untuk itu pemerintah memberi kebijakan untuk memudahkan wajib pajak yang melakukan Usaha Kecil mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengenaan pajak, yaitu secara yuridis mengacu kepada Pasal 4 ayat 2 huruf e. Untuk itu di terapkan dan di terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omset atau peredaran bruto tertentu.

1.5 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Pembahasan yang dimaksudkan dalam masalah ini agar tidak terjadi perbedaan menginterpretasikan laporan tugas akhir pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013, maka penulis membuat judul “Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46 Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pajak Usahawan” pada CV. Arfindo Global yang wajib pajaknya terdaftar di KPP Sukomanunggal Surabaya. Untuk itu saya sebagai penulis tertarik melakukan penelitian pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46.

